



MOTIVASI PATUH PAJAK DI KAWASAN KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

Putri Aulia Eka Ramadhani¹, Ilham Fabian Adani²

Institut Agama Islam Negeri Kediri

E-mail : aulia7438@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui dan memahami dari motivasi dorongan patuh pajak di Indonesia. Penelitian dilakukan secara kualitatif serta menggunakan analisis data. Adanya kemauan untuk wajib pajak dan mengikuti regulasi perpajakan, dapat meningkatkan semangat dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Menciptakan kesadaran masyarakat dengan melaksanakan kewajiban pajak dengan mematuhi norma sosial maupun norma hukum yang terdapat adanya peraturan perpajakan. Langkah langkah atau tindakan prefentif dari pemerintah dalam khususnya lembaga pajak, perlu di adakan sebuah edukasi secara masif dari segala sektor baik industri atau masyarakat umum. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak semena menang untuk pribadi atau diri sendiri melainkan dan untuk kepentingan masyarakat. Dengan penerapan tertib pajak mewujudkan kondisi dan realisasi pemerintah yang sempurna dan fluktuat. Setiap perencanaan pasti terdapat sisi positif dan negatif namun, dari segi kacamata penulis presentase segi negatif hanya beberapa persen saja dengan melihat begitu besar manfaat atau nilai positifnya. Kepatuhan sangat penting dan kompleks karena pada suatu sumber keuangan negara yang asalnya dari pajak. Yang selanjutnya yaitu menyadarkan diri sendiri melalui pendekatan secara fisik untuk memberikan pengarahan dan pengertian akan penting nya sebuah pajak. Hal ini sangat perlu untuk mewujudkan bernegara yang lebih baik dan optimal.

Kata Kunci: Motivasi, Upaya Penggerak, Patuh Pajak

PENDAHULUAN

Pada zaman kerajaan system perpajakan telah di laksanakan oleh kerajaan yang ada di Indonesia mereka menggunakan pajak sebagai kas kerajaan. Pemberian pajak oleh kerajaan meliputi sector-sector tertentu yang di latar belakang oleh ekonomi. Dalam hal ini yaitu sector pertanian dan pertanahan, lalu perdagangan besar meliputi kapal kapal dari luar yang berlabuh di dermaga kerajaan tersebut. Hal ini tentunya menjadi alternatif pem asukan kerajaan pada zaman itu. Hal ini juga sama dengan zaman penjajahan Belanda maupun Jepang. Dalam masa penjajahan Belanda kerap membuat peraturan perpajakan yang terkadang menguntungkan belanda itu sendiri. Misalnya pada zaman pemerintah Herman Willem Daendels dan Van Den Bosch. Cukup kita ketahui penerapan system pajak dalam era tersebut sangat menguntungkan belanda. Pada masa sekarang pajak sangatlah penting guna membangun perekonomian dan infratuktur negara.

Pajak sebenarnya untuk kepentingan rakyat juga namun rakyat tidak menyadari akan hal itu dan selalu beranggapan uang tersebut untuk hal-hal kurang memihak rakyat. Sebenarnya simple saja pajak bagus diiringi dengan pembayaran yang baik dan merata. Salah satu bentuk pengalokasian dana pajak yaitu pada pembangunan TOL yang telah di realisasikan sedemikian rupa.dan dana pajak



akan diguynakan untuk APBN, pembayaran ujtang negara, pemberian tunjangan ASN. Permsalahannya adalah pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, factor penghambat pembayaran pajak masyarakat, dan juga upaya peningkatan minat pajak. Tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk Mengetahui dampak pengaruh pajak dalam pertumbuhan ekonomi, untuk mengetahui factor penghambat pembayaran pajak, untuk mengetahui upaya peningkatn minat pajak.

Dalam kasuus ini penulis membuat tentang motivasi pajak yang ada di Kawasan Lamongan dengan konsentrasi di daerah Kecamatan Babat. Dengan harapan untuk mebuat sebuah efisiensi serta dorongan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak secara berkala. Banyak terjadi sebuah pengurangan pemasukan pajak di Kawasan tersebut dengan dalih adanya keurangan pada sebuah dorongan untuk melaksanakan pembayaran pajak secara berkala.

Pada dasarnya akredibilitas dan penangaan pajak merupakan usaha yang cukup dibilang susah dan gampang. Banyak factor-faktor yang memungkinkan pembayarana pajak tidak dapat berjalan optimal. Salah satunya yaitu kurang adanya motivasi atau pun penghargaan atas sikap patuh pajak yang sebenarnya beresensi pada pemasukan daerah tersebut. Momentum pada saat pengadaan motivasi pajak perlu adanya tekan dan dapat mengupayakan sebuah kopetensi untuk menggugah masyarakat agar dapat membayar pajak dengan maksimal tanpa adananya tekanan, dengan adanya semangat dan tekak yang kuat sehingga dapat mendorong masyarakat menjadi patuh terhadap wajib pajak. Alasan di mulainya penelitian ini karena masih banyak orang yang kurang akan memahami pentingnya membayar pajak serta kurang adanya motivasi atau pemberi semangat untuk membayar pajak yang merujuk pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada studi ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menggunakan dan menganalisis sebuah data yang objketif di dasarkan pada sebuah riset yang telah di lakukan sebelum penulisan studi ini, disajikan sebuah table yaitu data bagi hasil pajak Kab. Lamongan. Penulis membuat kualitatif untuk menjelaskan sebuah variable secara detail dan daapt mengukur dengan mengembangkan variable serta akan membuat topic akan mudah untuk dipelajari dan diteliti.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian

Reformasi perpajakan telah di diselenggarakan pada pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983. Tujuan dilaksanakan system perpajakan untuk meningkatkan kas negara lebih efisien dan efektif. Peningkatan penerimaan efektifitas pajak di pengaruhi oleh penerimaan pajak yang dapat memajukan pembangunan yang sempurna di Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu adanya kesejahteraan social yang munjang kelangsungan hidup, karena dalam peraturan negara, negara tersebut menjamin keberlangsungan hidup rakyat nya. Upayanya yaitu penerimaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan yang dealnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Gebreegziabher, 2018). Pengaruhnya terhadaap perekonomian yaitu pendanaan aktivitas produksi yang berkelanjutan maskudnya adalah terdapat



kegiatan ekonomi yang berjalan seiring waktu untuk menghasilkan income bagi negara pada khususnya Indonesia

Penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagian besar masih berasal dari sektor perpajakan. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, tak terkecuali oleh pemerintah daerah melalui beberapa fase reformasi perpajakan daerah. Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Reformasi ini berlangsung dalam tiga fase (Abuyamin, 2015). Fase pertama, dimulai sejak diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian fase kedua, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Dan fase ketiga, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Faktor yang mempengaruhi motivasi dari patuh pajak yang ada di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Banyak point-point penting yang dapat diambil dari pembayaran wajib pajak. Dari tindakan pembayaran pajak sendiri perlu adanya sebuah effort yang akan membuat sebuah gerakan untuk patuh pajak, karena di negara kita rendahnya motivasi akan patuh membayar pajak. Dan berikut ini factor-factorynya antara lain:

1. Perlu adanya sebuah komunitas atau organisasi untuk mengajak dan membuat sebuah kelompok kecil untuk saling mengapresiasi atas pembayaran pajak.
2. Pemberian edukasi dan membuat sebuah hadiah untuk siapa saja yang akan membayar pajak secara tepat waktu, bukan tidak munggiin segala jeri apayah akan membaut senang bila mendapatkan hadiah atau reward.

Dengan adanya hal itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan mengupayakan proses aptuh pajak yang ada di Kabupaten Lamongan khusus nya pada Kecamatan Babat. Penerapan tersebut haruslah berdasarkan apa yang diinginkan subjek untuk membuat sebuah gerakan-gerakan yang daapt menunjang keberlangusngan proses patuh pajak yang dinamis dan maksimal. Dan dengan adanya pengetahuan atau edukasi tentang perturan wajib pajak dapat diperbaiki dengan adanya motivasi kita yang patuh akan wajib membayar paajak, karena jika tidak memtuhi atau membayar wajib pejak, kan dikenakan sanksi yang berupa denda.

Factor Penghambat Pembayaran Pajak.

Dari secara umum penghambatnya dapat di prediksi sesuai fakta dan bukti kongkrit di lapangan yaitu, factor ekonomi setiap masyarakat memiliki penghasilan berbeda beda dan di latar belakang profesi yang beda beda setiap individu. Hal ini membuat income untuk memebayar pajak tidak bisa maksimal secara utuh atau nmungkin terdapat penundaan pembayaran. Yang kedua terdapat paksaan yang akan menimbulkan ke enggan an apabila masyaakat terjadi paksaan



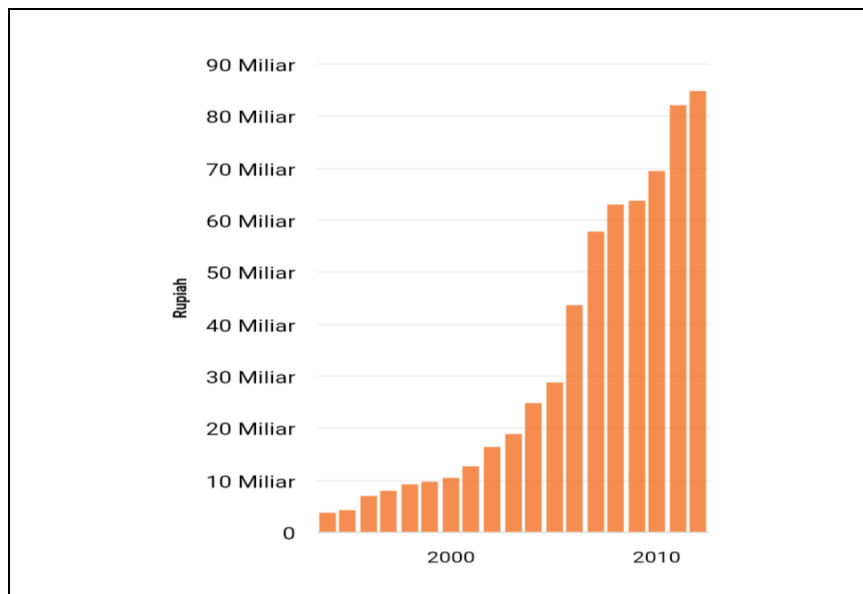
bukan tidak mungkin masyarakat akan menolak mentah mentah dan ada aksi unjuk rasa terhadap beban penolakan pajak.

Upaya Peningkatan Minat Pajak

Perlu adanya sebuah edukasi tentang pentingnya pajak dan apa itu pajak terkadang. Sebagian masyarakat cenderung kurang begitu faham akan arti pentingnya sebuah pajak. Sarana edukasi pajak dapat dilakukan dari sector terkecil yaitu desa. Peranan penting perangkat desa untuk mengayomi sebuah masyarakat dapat dilihat dari mana masyarakat mengetahui sesuatu hal yang umum dengan baik. Edukasi pajak itu perlu dengan koordinasi pihak atau instansi terkait akan dapat berjalan sesuai harapan yang diinginkan.

Di dalam variable tersebut individu ingin mendapatkan sebuah apresiasi untuk membuat dirinya semangat dan akan meningkatkan dalam upaya pembayaran pajak. Pengakuan pembayaran pajak perlu dilakukan karena untuk membuat sebuah komunitas khusus yang didalamnya berisikan agent of change yang artinya adalah untuk membuat sebuah Gerakan patuh pajak yang dapat diselenggarakan di Kawasan kawasan terkecil misal desa. Pembuatan kelompok kelompok patuh pajak dapat dibangun dengan edukasi mengenai materi perpajakan yang sederhana dan dapat mudah dimengerti serta dapat membuat pemahaman tentang pajak mudah dimengerti.

Jumlah Bagi Hasil Pajak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 1994 - 2012



Gambar 1. Jumlah Bagi Hasil Pajak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 1994 - 2012

Source: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2013

Pada data grafik diatas adanya sebuah peningkatan bagi hasil pajak Kab. Lamongan pada tahun 1994-2012. Hasil analisis kami yaitu pergerakan yang signifikan dari tahun ketahun dari 2005 menunjukkan bagi hasil pajak dikisaran angka 20 miliar, karena terdapat pergerakan aktivitas ekonomi baik sector industry perdagangan dan pariwisata tentunya membuahkan hasil yang positif



pada khususnya Kab. Lamongan. Pemerintah terus gencar mengingatkan akan pentingnya pajak karena sumber utama pemasukan daerah pada khususnya Kab. Lamongan berasal dari pajak, bisa kita ketahui apabila perolehan pajak dari masyarakat meningkat akan berdampak pada sebuah pembangunan yang baik dan optimal sesuai yang telah direncanakan. Dalam penelitian yang saya buat di Kab. Lamongan banyak terdapat industri pabrik-pabrik yang beroperasi. Tentunya bukan tidak mungkin sumber keuangan daerah bisa melalui industri tertentu jadi bukan hanya masyarakat yang harus selalu membayar pajak. Para penduduk Kecamatan Babat berprofesi sebagai petani.

Pada sampel kasus yang akan dibahas dalam materi ini, dapat kita ambil pengaruh adanya kondisi tertentu dimana akan mempengaruhi pembayaran pajak. Semisal pada sektor pariwisata pada musim liburan pariwisata dapat mencapai target sebesar 98% namun bila waktu liburan terdapat sebuah gangguan cuaca alam yang tidak stabil maka akan terjadi penurunan yang lebih besar biasanya sektor pariwisata kelautan, hal ini diperparah dengan pajak atau tanggungan yang wajib dibayarkan sebesar 10%. Tentunya pihak terkait dapat mengerti keadaan yang telah terjadi di Kawasan tersebut dengan menimbang dan mengobservasi keadaan lingkungan serta kalkulasi mengenai persentasenya. Karena permasalahannya sangat mendasar dan mempengaruhi aktivitas perekonomian yang objektif mendasari objek ada. Bila mana terjadi persentase yang tinggi bukan tidak mungkin pembayaran pajak sangat bisa dan mudah dibayarkan secara tepat waktu dan tidak jatuh tempo. Terkadang banyak oknum tertentu memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari untung. Berikut rancangan persentase pembayaran pajak pariwisata di musim-musim tertentu.

- ✓ Musim liburan Pariwisata = 100%
- ✓ Musim cuaca buruk = +/- 65%

Seperti gambaran di atas mengenai dampak yang diberikan sangat lah besar sehingga tak jarang terdapat penghambatan.

KESIMPULAN

Pada permasalahan ini, banyak sekali pro kontra terhadap perpajakan di negeri ini, tentunya kita harus bisa memahami dan mengerti akan pajak sebagai sumber keuangan negara. Dari semua golongan masyarakat hendaknya dan diwajibkan membayar pajak, namun pada tahun ini terjadi sebuah pandemic dimana, banyak orang kehilangan pekerjaan dan harus memutar otak untuk memulai sebuah usaha yang dinamis, agar bisa survive dan dapat menghidupi sanak family. Hendaknya para pemerintah dalam hal ini harus mengerti dan memahami keadaan yang tidak bisa di elak. Tapi sekiranya sudah terdapat solusi yang telah dikeluarkan budang terkait mengenai perpajakan. Yaitu telah menetapkan bebas pajak kepada para UMKM hingga oktober tentunya hal itu membuat kabar yang baik kepada para pedagang atau pealku usaha yang lainnya. Pada intinya kita sebagai warga negara hendaknya saling bahu-membahu dan bantu-membantu untuk mencapai satu tujuan yaitu persatuan Indonesia.

REFERENSI

- Budiandru, & Ulhaq, D. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B NET Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3). pp. 219-226. ISSN 1411-7835.



- <http://repository.uhamka.ac.id/466/>
Databoks. (2016 Mei 12). *Jumlah Bagi Hasil Pajak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 1994 - 2012*. Diperoleh 3 Agustus 2021, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/jumlah-bagi-hasil-pajak-di-kabupaten-lamongan-jawa-timur-1994-2012>
- Fauziah, S. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, E-Registration, Religiusitas Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Repository UHAMKA.
<http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/8959/contents>
- Hasannudin. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PPB Dengan Variabel Moderating Sikap Wajib Pajak Atas Sanksi Denda. (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dikota Tidore Kepulauan). *Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research*. 5(2), 64620. Repository
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=FAKTOR-FAKTOR+YANG+MEMPENGARUHI+KEPATUHAN+Wajib+PAJAK+DALAM+MEMBAYAR++PBB+DENGAN+VARIABEL+MODERATING+SIKAP+Wajib+PAJAK+ATAS+SANKSI+DENDA&btnG=#d=g_s_qabs&u=%23p%3DY5kouE9BwQcJ
- Karmila, S. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Repository UHAMKA.
http://repository.uhamka.ac.id/8961/1/FEB_AKT_1602015104_%20SUCI%20A.%20KARMILA.pdf
- Lallmahomed, M. Z., Lallmahomed, N., & Lallmahomed, G. M. (2017). Factors influencing the adoption of e-Government services in Mauritius. *Telematics and Informatics*. 34(4). Repository
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073658531630404X?via%3Dihub>
- Pieterse, W., & Teerling, M. (2008). Citizen behavior in a multi-channel environment. *Paper presented at the Proceedings of the 9th Annual International Conference on Digital Government Research. Partnerships for Public Innovation, DG.O*, Repository
https://www.researchgate.net/publication/221585095_Citizen_behavior_in_a_multi-channel_environment
- Safitra, D. A., (2021). *Penerimaan Wajib Pajak Pada Awal Implementasi E-Faktur Pajak Berbasis Desktop Application*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. 3(1). Repository JPKN
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1287/671>
- Subiyantoro. (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Patuh Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pramuka Jakarta Timur. Universitas Indonesia. Repository Universitas Indonesia Library <http://www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-109313.pdf>